



## Dinamika Konflik antara Masyarakat Buruh dengan Pengusaha (Studi Kasus Pabrik Ikan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar dalam Prespektif Teori Konflik Karl Max)

**Septian Bintang Cahyo**

Universitas Jember

Email: [septianbintangcahyo88@gmail.com](mailto:septianbintangcahyo88@gmail.com)

**Jovanes Agus Fernanda**

Universitas Jember

Email: [jovanesagusfernanda@gmail.com](mailto:jovanesagusfernanda@gmail.com)

**Ovie Faiz Pratama**

Universitas Jember

Email: [Oviefaz264@gmail.com](mailto:Oviefaz264@gmail.com)

JL. Bangka Tegalboto No.V Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember Jawa timur  
68121 , Indonesia

Koresponden penulis: [septianbintangcahyo88@gmail.com](mailto:septianbintangcahyo88@gmail.com)

**Abstract:** *This research explores the dynamics of conflict that occur between workers and factory entrepreneurs in Kedungrejo Village, Muncar District, using the perspective of Karl Marx's conflict icon theory. Fish factories are one of the main economic sectors in this area, and conflicts between fish factory workers and entrepreneurs have a significant impact on the social and economic life of local communities. Karl Marx's conflict theory is used as an analytical framework to understand the root of the problem, the resources being contested, and the role of social class in this conflict. This research includes participatory observation methods, interviews, and document analysis to explore the perspectives of fish factory workers and entrepreneurs. The research results show that the conflict in Kedungrejo Village is related to economic inequality and control of production resources. Workers experience exploitation, low wages and unsafe working conditions, while fish factory entrepreneurs try to maximize their profits. This conflict reflects the conflict between the working class who seek to protect their economic rights and entrepreneurs who prioritize their profits. In the perspective of Karl Marx's conflict theory, this conflict is the result of a structural conflict between the working class (proletariat) and the owners of capital (capitalists). These conflicts reflect fundamental inequalities in the distribution of wealth and power. This research proposes the need for more inclusive and fair solutions in overcoming this conflict, such as collective bargaining, stricter labor regulations, and building awareness of the working class to increase their bargaining power in negotiations with fish factory entrepreneurs. Thus, this research provides insight into the dynamics of conflict between workers and fish factory entrepreneurs in the context of the Kedungrejo Village community, as well as its implications from the perspective of Karl Marx's conflict theory.*

**Keywords:** *conflict, labor, conflict theory*

**Abstrak:** Penelitian ini mengeksplorasi dinamika konflik yang terjadi antara buruh dan pengusaha pabrik ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, dengan menggunakan prespektif teori konflik Karl Marx. Pabrik ikan merupakan salah satu sektor ekonomi utama di daerah ini, dan konflik antara buruh dan pengusaha pabrik ikan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Teori konflik Karl Marx digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami akar permasalahan, sumber daya yang diperebutkan, serta peran kelas sosial dalam konflik ini. Penelitian ini mencakup metode observasi partisipatif, wawancara, dan analisis dokumen untuk menggali perspektif buruh dan pengusaha pabrik ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di Desa Kedungrejo berkaitan dengan ketidaksetaraan ekonomi dan penguasaan sumber daya produksi. Para buruh mengalami eksploitasi, upah yang rendah, serta kondisi kerja yang tidak aman, sementara pengusaha pabrik ikan berusaha memaksimalkan keuntungan mereka. Konflik ini mencerminkan pertentangan antara kelas buruh yang berusaha melindungi hak-hak ekonomi mereka dan pengusaha yang mengedepankan keuntungan mereka. Dalam perspektif teori konflik Karl Marx, konflik ini merupakan akibat dari pertentangan struktural antara kelas pekerja (proletariat) dan pemilik modal (kapitalis). Konflik ini mencerminkan ketidaksetaraan yang mendasar dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan. Penelitian ini mengusulkan perlunya solusi yang lebih inklusif dan adil dalam mengatasi konflik ini, seperti perundingan kolektif, regulasi ketenagakerjaan yang lebih ketat, dan pembangunan kesadaran kelas buruh untuk meningkatkan

Received September 30, 2023; Revised Oktober 20, 2023; November 09, 2023

\* Septian Bintang Cahyo, [septianbintangcahyo88@gmail.com](mailto:septianbintangcahyo88@gmail.com)

kekuatan tawar mereka dalam negosiasi dengan pengusaha pabrik ikan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang dinamika konflik antara buruh dan pengusaha pabrik ikan dalam konteks masyarakat Desa Kedungrejo, serta implikasinya dalam perspektif teori konflik Karl Marx.

**Kata kunci:** konflik, tenaga kerja, teori konflik

## **A. Pendahuluan**

Konflik antara buruh dan pengusaha pabrik ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, merupakan isu sosial ekonomi yang kompleks dan penting. Desa Kedungrejo terletak di pesisir Jawa Timur, Indonesia, yang merupakan salah satu daerah yang sangat bergantung pada industri perikanan. Pabrik ikan di daerah ini telah menjadi pilar utama dalam perekonomian lokal, menyediakan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk desa. Namun, di balik kontribusi ekonomi yang signifikan, konflik antara buruh dan pengusaha pabrik ikan menjadi isu yang tidak terhindarkan. Konflik ini memiliki akar permasalahan yang melibatkan ketidaksetaraan dalam distribusi keuntungan, kondisi kerja yang tidak memadai, serta ketidaksetaraan dalam penguasaan sumber daya produksi. Terutama, buruh seringkali mengalami upah yang rendah, jam kerja yang panjang, dan kurangnya perlindungan hak-hak pekerja. Konflik semacam ini merugikan tidak hanya buruh, tetapi juga dapat mengancam stabilitas sosial di desa (Marx 2019).

Dalam konteks ini, teori konflik Karl Marx menjadi relevan. Teori ini menyoroti pertentangan struktural antara kelas sosial yang memiliki perbedaan kepentingan dan kekuasaan. Pemahaman teori ini dapat memberikan wawasan yang dalam tentang dinamika konflik antara buruh (proletariat) yang berusaha melindungi hak-hak ekonomi mereka dan pengusaha pabrik ikan (kapitalis) yang cenderung mengedepankan keuntungan ekonomi mereka. Selain itu, konflik antara buruh dan pengusaha pabrik ikan di Desa Kedungrejo mencerminkan tantangan sosial yang lebih luas yang dihadapi oleh masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan di seluruh dunia, terutama dalam konteks globalisasi dan perubahan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian tentang dinamika konflik ini dalam perspektif teori konflik Karl Marx sangat penting untuk menggali akar masalah dan mencari solusi yang lebih inklusif dan adil. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang konflik ini, mungkin akan ditemukan langkah-langkah konkret yang dapat membantu memperbaiki kondisi buruh dan mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan ekonomi dan sosial di Desa Kedungrejo dan daerah serupa. Dengan adanya langkah-langkah yang konkrit harapannya keberadaan lembaga ekonomi pedesaan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan baik sebagai buruh tani maupun usaha ekonomi produktif rumah tangga miskin. (Hermanto Rohman & Joko Mulyono, 2017)

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Definisi Teori Konflik Karl Max**

Teori konflik atau teori struktur konflik (Musleh Wahid, 2019) diperkenalkan pada tahun 1960. Teori ini pertama kali muncul dalam sosiologi Amerika sebagai kebangkitan dari ide-ide yang sebelumnya diungkapkan oleh Karl Marx dan Max Weber (Peter Singer, 2021). Ide dasar teori konflik ini karena itu diambil dari pemikiran kedua pemikir ini. Marx dan Weber dengan tegas menolak gagasan bahwa masyarakat cenderung mengarah pada konsensus dasar atau harmoni di mana struktur masyarakat saat ini bekerja untuk kebaikan semua. Bahkan, menurut Marx dan Weber, konflik dan konflik kepentingan masing-masing individu dan setiap kelompok saling bertentangan dan merupakan penentu terpenting organisasi kehidupan sosial. Karl Marx (1818-1883) (Peter Singer, 2021) dianggap sebagai pelopor penting teori konflik. Dasar pemikiran Marx adalah eksploitasi massal, yang diyakini sebagai pendorong utama kekuatan sejarah (Peter Singer, 2021). Marx menganggap perbedaan kelas, yang salah satunya disebabkan oleh proyek industrialisasi, dan ini hanya mengejar keuntungan ekonomi (Musleh Wahid, 2019).

Perjuangan masyarakat kelas merupakan konsep fundamental yang dikonseptualisasikan oleh Karl Marx pada saat itu. Pemicunya adalah situasi sosial saat itu, yang dikelilingi oleh industrialisasi pada abad ke-19: industrialisasi menciptakan kelas pekerja dan industrialis, yang pada gilirannya menyebabkan keterasingan. Perspektif konflik, yang berakar pada pemikiran Karl Marx, diakui oleh sosiolog sebagai jalan keluar, oleh karena itu terkait erat dengan revolusi (Peter Singer, 2021). Konflik di sini tidak dimaksudkan sebagai revolusi radikal, apalagi pertumpahan darah. Bagaimanapun, Marx adalah seorang humanis. Pada hakikatnya teori konflik melihat adanya perbedaan pendapat dan konflik dalam sistem sosial. Maka masyarakat tidak akan selalu baik-baik saja. Teori ini juga membahas otoritas yang berbeda yang mengarah pada superioritas dan subordinasi. Perbedaan kepentingan kedua hal ini kemudian menimbulkan konflik. Namun, teori konflik itu sendiri juga menunjukkan bahwa konflik dalam proses sosial ini diperlukan untuk menghasilkan perubahan sosial baik ke arah negatif maupun positif. Teori konflik Karl Marx telah lama diabaikan oleh para sosiolog. Namun, teori ini tidak muncul kembali sampai tahun 1960 (Peter Singer, 2021). Beberapa sosiolog telah menghidupkan kembali teori konflik, seperti C. Wright Mills (1956-1959), Lewis Coser: [1956] dan lain-lain [Aron, 1957; Dahrendorf, 1959, 1964; Chambliss, 1973; Collins, 1975]. Berbeda dengan fungsionalis, yang melihat keadaan normal masyarakat sebagai keseimbangan statis, teori konflik

cenderung melihat masyarakat dalam konflik konstan dalam kelompok dan kelas. Para ahli teori konflik bahkan mengklaim bahwa kaum fungsionalis tidak menanyakan kepada diri mereka sendiri pertanyaan yang "berguna secara fungsional" tentang siapa yang dituju.

Keseimbangan harmonis yang dimaksud oleh fungsionalis hanya dipandang bermanfaat bagi sebagian orang sedangkan merugikan bagi sebagian lainnya. Para ahli teori konflik berpendapat bahwa keseimbangan sosial, seperti yang dimaksudkan oleh para fungsionalis ini, hanyalah fantasi karena mereka tidak mampu menjelaskan bagaimana kelompok dominan mengeksploitasi dan membungkam kelompok lain. Dalam teori Marx (Peter Singer, 2021), keberadaan hubungan pribadi dalam produksi dan kelas sosial dipandang sebagai elemen kunci yang ada di banyak masyarakat. Marx juga berpendapat bahwa perubahan sosial yang tercipta sebagian besar dipengaruhi oleh adanya konflik antara kelas penguasa dan kelas bawahan. Konflik berasal dari kata "configure," yang mengacu pada tindakan saling memukul. Dari perspektif sosiologis, konflik dapat didefinisikan sebagai sebuah proses sosial yang terjadi ketika dua orang atau lebih, termasuk kelompok, terlibat dalam upaya salah satu pihak untuk mengeliminasi atau melemahkan pihak lain, seringkali melalui tindakan penghancuran atau pembuatan mereka tidak berdaya. Soerjono Soekanto (2006) mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk mencapai tujuan mereka dengan cara melawan pihak lawan, seringkali dengan ancaman atau tindakan kekerasan.

Menurut Pritt dan Rubbin seperti yang dikutip dalam Syahril Ramadhan (2008), konflik dapat dipahami sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau keyakinan bahwa aspirasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak dapat dicapai secara bersamaan. Berdasarkan teori konflik, masyarakat secara konstan berada dalam proses perubahan yang dicirikan oleh konflik yang berkelanjutan antara elemen-elemen yang ada dalam masyarakat. Teori konflik ini memandang bahwa setiap elemen memberikan kontribusi terhadap disintegrasi sosial.

Selain itu, teori konflik juga berpendapat bahwa keteraturan yang ada dalam masyarakat hanyalah terjadi karena tekanan atau pemaksaan dari golongan yang berkuasa. Konflik dipandang sebagai bagian integral dalam kehidupan manusia. Ketika individu atau kelompok bersaing untuk menguasai suatu wilayah, mereka tidak hanya bersaing untuk memperoleh lahan, tetapi juga sumber daya alam seperti air, emas, mineral, hutan, dan berbagai sumber daya alam lainnya. Konflik dapat muncul dalam

berbagai bentuk, dari pertentangan non-fisik hingga eskalasi menjadi benturan fisik, kekerasan, dan tindakan yang tidak berwujud.

Konflik yang terjadi dapat terbagi menjadi konflik vertikal, yaitu konflik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta konflik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa. Selain itu, ada juga konflik horizontal, yaitu konflik antaranggota masyarakat. Teori konflik menekankan bahwa unsur-unsur dalam masyarakat cenderung dinamis dan sering mengalami perubahan. Setiap elemen dalam masyarakat memiliki potensi untuk menyebabkan disintegrasi sosial. Terakhir, teori konflik menyoroti perbedaan dalam distribusi kekuasaan dan otoritas di dalam masyarakat sebagai faktor penting dalam terjadinya konflik sosial yang bersifat sistematis (Ritzer, 2002).

Manusia Indonesia yang bersedia bekerja dan menjalankan kepentingan bangsa dan negara untuk tujuan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini konsep manusia yang membangun menjadi urgen untuk disikapi karena hal ini selaras dan menjadi prasyarat berjalannya indoktrinasi pelaksanaan repelita. (Dien Vidia Rosa, 2022)

## **2. Faktor penyebab konflik**

Pandangan sosiologi menyatakan bahwa perubahan adalah ciri tetap dalam masyarakat, dan setiap unsur dalam masyarakat memberikan kontribusi terhadap timbulnya konflik. Ketidakseimbangan dalam hubungan sosial, ekonomi, dan kekuasaan adalah salah satu faktor pemicu konflik. Contohnya, ketidakmerataan dalam kemakmuran dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dapat mengakibatkan berbagai masalah di dalam masyarakat (Fisher, Simon, dkk. 2001). Faktor-faktor penyebab konflik menurut Soejono Soekanto (2006), antara lain yaitu

- a. Adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, karena setiap manusia unik, dan mempunyai perbedaan pendirian, perasaan satu sama lain. Perbedaan pendirian dan perasaan ini akan menjadi satu faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan Sosial seorang individu tidak selalu beriringan dengan individu atau kelompok lainnya.
- b. Varian latar belakang budaya menciptakan perbedaan dalam pribadi-pribadi, dan individu secara beragam terpengaruh oleh pemikiran dan pendekatan kelompoknya, menghasilkan keragaman individu yang bisa memicu konflik.
- c. Perbedaan kepentingan, baik pada tingkat individu maupun kelompok, muncul dari perasaan, pandangan, dan latar belakang budaya yang berbeda. Ketika individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda secara bersamaan, hal ini dapat

menyebabkan konflik, yang dapat mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

- d. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan tiba-tiba dalam masyarakat dapat menjadi pemicu konflik sosial. Perubahan adalah bagian dari kehidupan yang wajar, namun jika perubahan tersebut terjadi secara cepat atau tiba-tiba, bisa memicu konflik sosial. Sebagai contoh, dalam masyarakat pedesaan yang tiba-tiba mengalami industrialisasi, terjadi perubahan nilai-nilai dari yang semula bersifat pertanian menjadi nilai-nilai industri, seperti dari gotong royong menjadi kontrak kerja dengan upah yang spesifik sesuai jenis pekerjaan. Perubahan semacam ini, terutama jika terjadi dengan cepat, dapat mengguncang struktur sosial masyarakat dan menciptakan perlawanan terhadap perubahan yang dianggap mengganggu keseimbangan tatanan sosial yang ada.

### **C. Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif teknik pengambilan data yang dilakukan peneliti yaitu observasi partisipatif meliputi peninjauan lapangan, wawancara terhadap masyarakat di sekitar pabrik, adapun pertanyaan mengenai wawancara yaitu tentang sumber daya manusia meliputi tingkat pendidikan, gaji yang didapat oleh buruh sebagai sumber penghidupan, hak hak pegawai, pelanggaran pabrik yang tidak sesuai dengan rui cipta kerja. Dalam wawancara tersebut penulis menemukan beberapa hal yang menjadi pemicu terjadinya konflik antara kaum prletar dan burjois.

### **D. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Latar belakang konflik**

Penelitian ini fokus membahas tentang dinamika konflik yang terjadi antara kaum pengusaha pabrik dengan buruh. Kecamatan Muncar merupakan daerah bagian dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah nelayan dan buruh pabrik yang khusus dalam pengelolaan ikan. Daerah ini juga menjadi salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Konflik ini terjadi karena beberapa perusahaan yang tidak menerapkan peraturan yang seharusnya di taati seperti yang informasidi dapat dalam wawancara yaitu tidak adanya hak hak karyawan atau buruh yang di penuhi seperti tidak adanya jaminan sosial, jaminan ketanaga kerjaan dan tidak adanya asas kemanusiaan/humanisme yang tidak ada.

## **2. Faktor faktor penyebab konflik**

### **a. Hak hak buruh yang tidak terpenuhi**

Salah satu bidang perkembangan hukum adalah perkembangan bahan hukum, Bagir Manan menggunakan istilah politik pembentukan hukum, atau istilah lain yang digunakan oleh Hikmahanto Juwono, politik hukum perundang-undangan. Dalam politik pembentukan hukum, secara konseptual politik hukum memiliki dua dimensi (Anggoro, 2019), yaitu dimensi politik hukum yang menjadi alasan mendasar dibuatnya peraturan perundang-undangan. Dimensi politik hukum ini disebut kebijakan dasar. Dimensi kedua dari politik hukum adalah tujuan atau alasan di balik perumusan peraturan. Dimensi politik hukum inilah yang disebut dengan kebijakan penegakan. Tentang politik hukum kebebasan berserikat dan hak-hak pekerja/organisasi buruh dalam produk hukum ketenagakerjaan Indonesia, negara mengakui dan menjamin perlindungan kebebasan berserikat dan hak-hak pekerja/organisasi buruh sebagai kebijakan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, melalui rumusan ketentuan konstitusi nasional, yaitu Pasal 28 E (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi”

### **b. Ketidakadilan dalam Kelas sosial**

Bila membahas teori kelas, maka akan banyak menemui istilah kelas sosial. Kelas sosial sendiri sejatinya adalah golongan masyarakat. Lenin, pemimpin Revolusi Rusia 1714, mengartikan kelas sosial sebagai golongan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi. Namun di sisi lain, Karl Marx berpendapat bahwa kelas sosial dan golongan masyarakat adalah dua hal yang berbeda. Kelas sosial merupakan gejala khusus masyarakat pascafeodal, sedangkan golongan masyarakat adalah apa yang biasa disebut dengan kasta (Hendriwani 2022).

Teori kelas dari Marx berdasarkan pemikiran bahwa segala bentuk masyarakat dari dahulu hingga sekarang adalah pertikaian antara golongan. Menurut pandangannya, masyarakat mempunyai perbedaan-perbedaan fundamental antara golongan yang bertikai di dalam mengejar kepentingannya masing-masing. Bagi Marx, dasar dari sistem stratifikasi adalah tergantung dari hubungan kelompok-kelompok manusia terhadap sarana produksi. Kelas dalam hal ini adalah suatu kelompok orang-orang yang mempunyai fungsi, tujuan dan struktur sosial yang sama dalam organisasi. Kelas bagi Marx selalu didefinisikan berdasarkan

potensinya terhadap konflik. Individu-individu membentuk kelas sepanjang mereka berada di dalam suatu konflik biasa dengan individu-individu yang lain tentang nilai-surplus. Di dalam kapitalisme terdapat konflik kepentingan yang inheren antara orang yang memberi upah para buruh dan para buruh yang kerja pada mereka diupah kembali menjadi nilai surplus. Konflik inheren inilah yang membentuk kelas-kelas. Ada dua kelas yang menjadi perhatian Marx adalah proletariat dan borjuis. Proletariat adalah para pekerja yang menjual jasa mereka dan tidak memiliki alat-alat produksi sendiri. Kelas borjuis merupakan nama khusus untuk para kapitalis dalam ekonomi modern. Mereka memiliki alat-alat produksi dan memperkerjakan pekerja upahan. Borjuis adalah para pemilik modal yang memberi upah ke kaum proletariat

Kelas sosial baru disebut sebagai kelas sosial dalam arti sesungguhnya apabila secara objektif merupakan golongan sosial dengan kepentingan sendiri dan secara subjektif merupakan golongan khusus dalam masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan spesifik serta mau memperjuangkannya. Teori konflik Karl Marx berfokus pada pertentangan kelas sosial dalam masyarakat kapitalis. Dalam pabrik ikan di Desa Kedungrejo, ada dua kelompok utama yang menciptakan pertentangan kelas, yaitu pemilik modal (pengusaha) dan pekerja (buruh). Pemilik modal memiliki kendali atas alat produksi dan sumber daya, sementara pekerja hanya memiliki tenaga kerja mereka. Pertentangan kelas ini menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang menjadi sumber konflik. Dalam konteks pabrik ikan di Desa Kedungrejo, pertentangan kelas tersebut mencerminkan ketidaksetaraan antara pemilik modal, yang memiliki kontrol atas alat produksi dan sumber daya, dan pekerja (buruh), yang menyediakan tenaga kerja mereka. Konflik ini dapat muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan antara kedua kelompok ini:

1. **Pemilik Modal (Pengusaha):** Mereka memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi dalam operasi pabrik ikan. Hal ini dapat mencakup upaya untuk mengendalikan biaya tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendapatkan hasil ekonomi yang sebesar-besarnya.
2. **Pekerja (Buruh):** Kepentingan utama pekerja adalah memperoleh upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan manusiawi, serta jaminan keamanan kerja. Mereka mungkin merasa bahwa pemilik modal mencoba untuk mengeksploitasi mereka dengan memberikan upah rendah atau mengekang hak-hak mereka.



Dalam teori konflik Marxian, ketegangan ini menciptakan dinamika konflik, dan pekerja mungkin berusaha untuk mengorganisasi diri mereka sendiri, bersatu dalam sindikat, atau melakukan pemogokan atau protes sebagai upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan meningkatkan kondisi kerja. Pemahaman akan pertentangan kelas sosial ini dalam konteks pabrik di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar akan membantu dalam menganalisis dan menjelaskan dinamika konflik yang mungkin terjadi dan memahami peran teori konflik Marxian dalam memahami situasi ini.

### **c. Terjadinya eksploitasi terhadap buruh**

Eksplorasi merujuk kepada hubungan sosial di mana seorang "aktor atau karakter aktor yang menggunakan hubungan kekuasaan asimetris secara fundamental antara mereka". Saat berbicara tentang eksploitasi, terdapat sebuah afiliasi langsung dengan konsumsi dalam. Biasanya, ia akan melabeli eksploitasi sebagai kemajuan yang dipegang secara tak adil dari orang lain karena posisi inferiornya, memberikan pengeksploitasi tersebut sebuah kekuasaan yang dianggap pakar teori eksploitasi paling klasik dan berpengaruh, tidak berbagi catatan eksploitasi tradisional yang sama. Teori Marx secara khusus menolak karakteristik moral dari eksploitasi, dan memegang konsep bidang hubungan buruh. Dalam menganalisis eksploitasi, beberapa ekonom politik sering kali berbenturan antara penjelasan eksploitasi buruh yang diberikan oleh Marx (Limjong and Fitri 2023).

Konflik antara buruh dengan pengusaha atau kaum proletar terjadi karena eksploitasi yang dilakukan oleh kaum proletar dalam hal gaji yang tidak sesuai seperti yang dikatakan oleh narasumber Rizki Andika bahwa sistem gaji dibagi menjadi 3 kategori yaitu gaji harian, mingguan dan bulanan akan tetapi akar dari permasalahan dalam aspek sistem gaji yaitu penghitungan sistem lembur yang tidak konsisten. Hal ini termaktub dalam UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur pula soal upah minimum. Pasal 88 ayat (2) UU 6/2023 mengatur pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari informasi yang diperoleh terhadap hasil data dengan wawancara Rizki mengatakan bahwa "upah lembur cenderung berbeda dan upah yang diberikan tidak sesuai dalam UU cipta kerja".

#### **d. Perbedaan kepentingan**

Perbedaan kepentingan yang terjadi dalam kasus Pabrik Ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, mencakup keinginan buruh untuk upah yang lebih adil dan kondisi kerja yang aman, sementara pengusaha pabrik ikan berusaha untuk mengendalikan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan mereka. Selain itu, masyarakat lokal dan organisasi lingkungan mungkin memperjuangkan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pemerintah daerah memiliki kepentingan dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di wilayah mereka, sambil memastikan agar perusahaan mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku.

#### **Kesimpulan**

Penelitian ini berfokus pada dinamika konflik antara pengusaha pabrik dan buruh di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, yang merupakan daerah penting dalam produksi ikan di Indonesia. Konflik ini muncul karena beberapa perusahaan tidak mematuhi regulasi yang seharusnya melindungi hak-hak pekerja, seperti jaminan sosial, jaminan ketenagakerjaan, dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Faktor-faktor penyebab konflik meliputi ketidakpenuhan hak-hak buruh, ketidakadilan dalam struktur kelas sosial, dan terjadinya eksploitasi terhadap buruh. Ketidaksetaraan ekonomi dan perbedaan kepentingan antara pemilik modal (pengusaha) dan pekerja (buruh) menciptakan ketegangan yang mendorong konflik. Hal ini terutama mencerminkan perbedaan antara mereka yang memiliki kendali atas alat produksi dan sumber daya dengan mereka yang hanya menyediakan tenaga kerja mereka.

Dalam teori konflik Marxian, pertentangan kelas sosial ini menjadi dasar analisis konflik. Pekerja mungkin berusaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan meningkatkan kondisi kerja melalui sindikat, pemogokan, atau protes. Dalam konteks kasus Pabrik Ikan di Desa Kedungrejo, pemahaman akan perbedaan kepentingan ini dapat membantu menganalisis dinamika konflik dan peran teori konflik Marxian dalam memahami situasi ini. Dengan demikian, konflik ini mencerminkan ketidaksetaraan dan perbedaan kepentingan yang muncul dalam konteks produksi ikan di daerah tersebut, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang teori konflik Marxian dan prinsip-prinsip perlindungan hak pekerja dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia.

## DAFTAR PUSAKA

- WIDANINGTYAS, Adoniati Meyria; DAROJAT, Windu. Maintaining Political Rights Equality. *Journal of Contemporary Sociological Issues*, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 108-132, aug. 2023. ISSN 2775-2895. Available at: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JCSI/article/view/28960>. Date accessed: 28 oct. 2023. doi: <https://doi.org/10.19184/csi.v3i2.28960>.
- Rosa, D. V. (2022). Pancasila Dan Politik Toleransi Orde Baru. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/111865>
- Rohman, Hermanto Mulyono, Joko
- STUDI KELAYAKAN PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI PEDESAAN BAGI TERWUJUDNYA DESA MANDIRI DI KABUPATEN BANYUWANGI  
<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79330>
- Hendriwani, Subur. 2022. "Teori Kelas Sosial Dan Marxisme Karl Marx." *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 2(01): 13–28.
- Limbong, Ronny Josua, and Okta Rina Fitri. 2023. "The Human Rights Framework for Covid-19 Pandemic Recovery : A Sustainable Development Goals Insights." 3(2): 158–76.
- Marx, Pemikiran-pemikiran Karl. 2019. "Pemikiran-Pemikiran Karl Marx." (October).
- Arikunto, S. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Diana, Francis. 2006. *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*. Yogyakarta: Quills.
- Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Alih Bahasa S. N. Kartikasari, dkk. Jakarta: The British Council, Indonesia.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Nasikun. 1993. *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soetopo. 1999. *Teori Konflik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winardi. 2000. *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Skipsi: Sahlan. 2015. *Konflik Antara Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus pada Eksplorasi Tambang di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)*. Makassar: FISIP Universitas Hasanuddin